

**RENCANA KERJA ( RENJA )  
PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2026**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 dapat tersusun. Adanya Renja ini maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang telah mempunyai suatu pedoman bagi pelaksanaan kegiatan demi kelancaran pembangunan Kabupaten Ketapang serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Renja disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2026 serta bagian tak terpisahkan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Renja memiliki peranan yang sangat penting, selain sebagai kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan, Renja juga berperan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana kualitas proses penyusunan dan kualitas substansi dokumen ini benar-benar memenuhi pendekatan perencanaan yang efektif dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Untuk itu proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara berkelanjutan.

Ketapang, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19670427 200003 1 003

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	4
1.4. Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II      HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU.....</b>	<b>7</b>
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....	22
2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang .....	24
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 .....	26
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	34
<b>BAB III     TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG ....</b>	<b>37</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....	37
3.3. Program dan Kegiatan .....	38
<b>BAB IV     RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG .....</b>	<b>46</b>
<b>BAB V      PENUTUP .....</b>	<b>52</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang .....	10
Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024.....	19
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sampai Dengan Tahun 2024.....	23
Tabel 2. 4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang .....	28
Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten KetapangDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.....	34
Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 .....	38
Tabel 3.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026.....	40
Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027 .....	47

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah .....**Error!**  
**Bookmark not defined.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

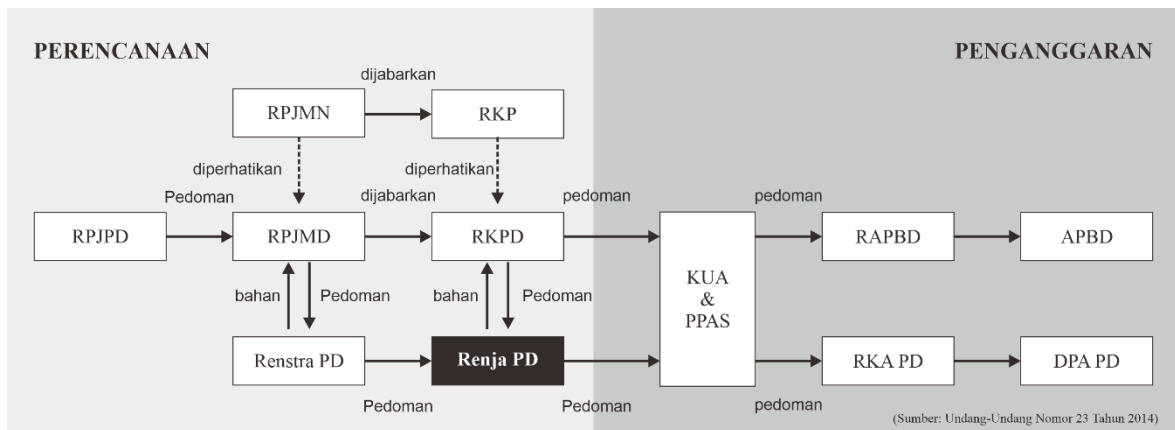
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik jangka menengah (lima tahunan) dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) maupun jangka pendek (tahunan) dalam bentuk Rencana Kerja (Renja). Renja adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan tahapan awal dalam perencanaan penganggaran. Hal ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja tahun lalu dan hasil evaluasi Renja tahun berjalan, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran kegiatan.

Proses penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 mengacu pada rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2026 dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan yang dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

**Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen terhadap Renja Perangkat Daerah**



Dalam Gambar 1.1. di atas menjelaskan bahwa dalam penyusunan Renja mempedomani Renstra Perangkat Daerah (PD), untuk penyusunan Renja tahun 2026 maka berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2026 dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaannya. Selanjutnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  - g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  - h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 52);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2020 Nomor 15).
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ketapang tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 95); dan
- l. Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program dan kegiatan, dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara berkesinambungan dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2026.

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan dokumen rencana kerja perubahan tahunan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 dengan berdasarkan pada RKPD Kabupaten Ketapang tahun 2026 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. Mengelola upaya-upaya dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang secara sistematis dan

- terorganisir, diantaranya melalui penetapan target-target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun sebelumnya;
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
  - d. Memberikan pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG TAHUN LALU**

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, analisis kinerja pelayanan Kabupaten Ketapang, isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, review terhadap Rancangan Awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

##### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, serta tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

##### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Memuat rencana kerja dan rencana pendanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026.

## BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

# **HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Kualitas penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yang disusun berdampak terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi daerah yang telah ditetapkan. Dalam penyusunan Renja diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya yang dikaitkan dengan pencapaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026

Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan, serta mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan serta hambatan/permasalahan yang dihadapi. Untuk penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 diperlukan evaluasi hasil capaian Tahun 2024. Juga disajikan perkiraan capaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2025. Pada tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang melaksanakan sebanyak 6 ( enam ) program dengan rencana anggaran sebagaimana tertuang di dalam APBD sebesar Rp. 13.250.536.150,00 Dalam pelaksanaannya program tersebut dapat diselesaikan seluruhnya dengan realisasi anggaran Rp 12.586.298.772,00 atau sebesar 94,99 persen.

#### **2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021-2026 dengan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.**

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebagai berikut:

- a. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang:
- 1) Dalam Rangka pencapaian target yang ditetapkan dilaksanakan 1 (Satu) Urusan Wajib, 6 (enam) Program dan 6 (enam) Indikator Kinerja Program serta 13 (tiga belas) Kegiatan dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan serta 53 ( Lima Puluh Tiga ) Sub Kegiatan dengan 53 (Lima Puluh Tiga ) Indikator Kinerja Sub Kegiatan.
  - 2) Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Program, terdapat 0 ( nol ) indikator yang melampaui target, 6 (enam) indikator sesuai target, serta 0 ( nol ) indikator tidak memenuhi target.
- b. Perkiraan Capaian Target Renstra Tahun 2021- 2026 sampai dengan tahun 2025 sebagai berikut:
- 1) Dalam rangka pencapaian target telah ditetapkan 1 (Satu) urusan, 6 (enam) program dengan 6 (enam) indikator program dan 13 (tiga belas) kegiatan dengan 13 (tiga belas) indikator kegiatan.
  - 2) Dari 6 (enam) indikator kinerja program, terdapat 0 (nol) indikator yang dapat melampaui target, dan 6 (enam) Indikator dapat memenuhi target akhir periode Renstra.
  - 3) Dari 13 (tiga belas) indikator kinerja kegiatan, terdapat 13 (tiga belas) indikator yang diperkirakan telah memenuhi target Renstra, dan 0 (nol) indikator tidak dapat memenuhi Renstra.
- c. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.
- 1) Sistem Pengadaan atau Penyediaan Barang yang menggunakan aplikasi Ekatalog yang tidak sinkron dengan SIPD dalam hal Penetapan SSH dan koefisien sehingga sisa anggaran tidak dapat digeser atau diubah pada saat Perubahan.
  - 2) Adanya Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang sering berubah-ubah tidak diiringi dengan perubahan Sistem.
  - 3) Aplikasi yang digunakan (OSS dan SIMBG dan Si Cantik ) Error atau ada gangguan.
  - 4) Adanya pelaksanaan promosi investasi melalui pameran atau Expo dan APKASI serta Pembuatan Majalah / Video Potensi Investasi Daerah.

- d. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
- 1) Anggaran tidak dapat diserap 100 %
  - 2) Sisa anggaran yang tidak diserap 100 % akan menjadi Silpa.
  - 3) Capaian Kinerja tidak bisa tercapai sesuai target atau tercapai sesuai target.
- e. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program/kegiatan.
- 1) Agar para pihak pengelola perencanaan ( bappeda ), Penganggaran ( BPKAD ) dan Pengadaan ( LPSE ) satu kata dalam hal menetapkan SSH dan Koofisien dalam aplikasi SIPD RI.
  - 2) Melakukan Koordinasi dengan BKPM atau Kementerian Investasi dan Kementerian Pekerjaan Umum terkait Regulasi yang diterbitkan.
  - 3) Melakukan Koordinasi dengan kementerian terkait pengelolaan Aplikasi yang mengalami gangguan.
  - 4) Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi melalui pameran / Expo, Apkasi dan pembuatan Video/ Majalah Potensi Daerah.
  - 5) Meningkatkan Pengawasan kepada Pelaku Usaha dan memberikan Bimbingan Teknis kepada Pelaku usaha.
  - 6) Menyusun regulasi tentang kemudahan berusaha dan pemberian insentif
  - 7) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Gedung kantor.

Berikut ini adalah tabel rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2024 dan pencapaian Renstra sampai dengan tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang.

**TABEL 2.1**  
**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2024**  
**DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TAHUN 2025**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN KETAPANG**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2021-2026	Realisasi Capaian Kinerja Renstra-PD sampai dengan Renja-PD Tahun Lalu 2023	Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang dievaluasi			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (2024)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program/kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
	1	2	3	4	5	6	7 (6/5)	8	9=(4+6+8)	10=(9/3)
2	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASR</b>									
2.18	<b>BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>		<b>45.117.710.533,00</b>	<b>19.284.612.170,00</b>	<b>13.250.536.150,00</b>	<b>12.586.296.752,00</b>	<b>94,99</b>	<b>9.185.350.328,00</b>	<b>41.056.259.250,00</b>	<b>91,00</b>
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>	<b>30.201.900.000,00</b>	<b>13.578.558.941,00</b>	<b>7.575.199.999,00</b>	<b>7.197.128.841,00</b>	<b>95,01</b>	<b>6.919.462.517,00</b>	<b>27.695.150.299,00</b>	<b>91,70</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>389.000.000,00</b>	<b>175.484.235,00</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>99.337.256,00</b>	<b>93,71</b>	<b>69.818.800,00</b>	<b>344.640.291,00</b>	<b>88,60</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	42.000.000,00	15.249.383,00	8.000.000,00	6.610.800,00	82,64	8.000.000,00	29.860.183,00	71,10
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	16.000.000,00	5.714.194,00	3.000.000,00	2.802.900,00	93,43	3.000.000,00	11.517.094,00	71,98
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	16.000.000,00	5.536.588,00	3.000.000,00	2.243.000,00	74,77	3.000.000,00	10.779.588,00	67,37
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11.000.000,00	3.730.240,00	2.000.000,00	1.916.200,00	95,81	2.000.000,00	7.646.440,00	69,51

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	130.000.000,00	46.788.350,00	25.000.000,00	23.736.156,00	94,94	23.016.800,00	93.541.306,00	71,95
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.000.000,00	98.465.480,00	65.000.000,00	62.028.200,00	95,43	30.802.000,00	191.295.680,00	109,94
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>	<b>22.094.000.000,00</b>	<b>7.406.367.924,00</b>	<b>4.616.000.000,00</b>	<b>4.460.036.348,00</b>	<b>96,62</b>	<b>4.805.550.702,00</b>	<b>16.671.954.974,00</b>	<b>75,46</b>
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22.010.000.000,00	7.376.985.754,00	4.600.000.000,00	4.444.626.248,00	96,62	4.788.550.702,00	16.610.162.704,00	75,47
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	42.000.000,00	14.843.710,00	8.000.000,00	7.666.900,00	95,84	8.500.000,00	31.010.610,00	73,83
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	42.000.000,00	14.538.460,00	8.000.000,00	7.743.200,00	96,79	8.500.000,00	30.781.660,00	73,29
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>697.000.000,00</b>	<b>254.858.848,00</b>	<b>86.060.000,00</b>	<b>49.878.700,00</b>	<b>57,96</b>	<b>90.173.400,00</b>	<b>394.910.948,00</b>	<b>56,66</b>

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	7.000.000,00	3.000.000,00	-	-	#DIV/0!	-	3.000.000,00	42,86
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	45.000.000,00	97.000.000,00	50.000.000,00	45.060.000,00	110,96	-	142.060.000,00	315,69
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.000.000,00	9.986.561,00	5.000.000,00	4.818.700,00	96,37	5.000.000,00	19.805.261,00	79,22
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000,00	63.049.200,00	-	-	#DIV/0!	40.400.000,00	103.449.200,00	0,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.000.000,00	81.823.087,00	31.060.000,00	-	0,00	44.773.400,00	126.596.487,00	57,54
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.755.000.000,00</b>	<b>1.398.979.051,00</b>	<b>750.705.721,00</b>	<b>746.345.659,00</b>	<b>99,42</b>	<b>426.485.880,00</b>	<b>2.571.810.590,00</b>	<b>146,54</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35.000.000,00	26.983.890,00	15.000.000,00	14.517.000,00	96,78	15.000.000,00	56.500.890,00	161,43
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	720.000.000,00	501.962.578,00	219.751.721,00	217.978.700,00	99,19	199.361.340,00	919.302.618,00	0,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100.000.000,00	259.999.345,00	165.954.000,00	163.854.000,00	98,73	12.124.540,00	435.977.885,00	435,98
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	0	-	-	0,00	-	-	#DIV/0!
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	900.000.000,00	610.033.238,00	350.000.000,00	349.995.959,00	100,00	200.000.000,00	1.160.029.197,00	128,89
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.180.000.000,00</b>	<b>2.419.799.222,00</b>	<b>498.416.278,00</b>	<b>460.100.000,00</b>	<b>92,31</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>3.279.899.222,00</b>	<b>150,45</b>

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	950.000.000,00	0	-	-	0,00	-	-	0,00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	30.000.000,00	750.382.000,00	200.000.000,00	196.600.000,00	98,30	-	946.982.000,00	3156,61
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	950.000.000,00	439.867.422,00	184.635.078,00	179.600.000,00	97,27	300.000.000,00	919.467.422,00	96,79
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250.000.000,00	1.229.549.800,00	113.781.200,00	83.900.000,00	73,74	100.000.000,00	1.413.449.800,00	565,38
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>2.195.000.000,00</b>	<b>1.087.661.000,00</b>	<b>601.918.000,00</b>	<b>587.437.278,00</b>	<b>97,59</b>	<b>638.433.735,00</b>	<b>2.313.532.013,00</b>	<b>105,40</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	5.000.000,00	17.000.000,00	68,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	640.000.000,00	543.061.000,00	258.158.000,00	243.677.278,00	94,39	312.633.735,00	1.099.372.013,00	171,78
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.530.000.000,00	535.600.000,00	340.760.000,00	340.760.000,00	100,00	320.800.000,00	1.197.160.000,00	78,25
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>891.900.000,00</b>	<b>835.408.661,00</b>	<b>916.100.000,00</b>	<b>793.993.600,00</b>	<b>86,67</b>	<b>489.000.000,00</b>	<b>2.118.402.261,00</b>	<b>237,52</b>
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	240.000.000,00	187.561.999,00	150.000.000,00	142.782.400,00	95,19	100.000.000,00	430.344.399,00	179,31

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26.900.000,00	6.989.700,00	4.000.000,00	2.718.200,00	67,96	4.000.000,00	13.707.900,00	0,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	500.000.000,00	599.387.462,00	728.100.000,00	626.718.000,00	86,08	350.000.000,00	1.576.105.462,00	315,22
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	75.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	14.695.000,00	97,97	20.000.000,00	59.695.000,00	0,00
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	50.000.000,00	16.469.500,00	19.000.000,00	7.080.000,00	37,26	15.000.000,00	38.549.500,00	0,00
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>	<b>1.740.580.808,00</b>	<b>1.043.914.219,00</b>	<b>497.166.000,00</b>	<b>488.053.524,00</b>	98,17	<b>237.328.598,00</b>	<b>1.769.296.341,00</b>	<b>127,54</b>
<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	<b>650.580.808,00</b>	<b>154.849.160,00</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>135.649.288,00</b>	97,59	<b>88.632.900,00</b>	<b>379.131.348,00</b>	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	329.414.080,00	103.756.060,00	39.000.000,00	36.706.088,00	94,12	42.809.130,00	183.271.278,00	55,64
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	321.166.728,00	51.093.100,00	-	-	#DIV/0!	-	195.860.070,00	60,98
Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar ( PMA/PMDN ) dengan UMKM di daerah			100.000.000,00	98.943.200,00	98,94	45.823.770,00		

	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	<b>1.090.000.000,00</b>	<b>889.065.059,00</b>	<b>358.166.000,00</b>	<b>352.404.236,00</b>	<b>98,39</b>	<b>148.695.698,00</b>	<b>1.390.164.993,00</b>	<b>127,54</b>
	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	520.000.000,00	529.556.366,00	128.166.000,00	127.643.498,00	99,59	83.016.800,00	740.216.664,00	142,35
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	570.000.000,00	359.508.693,00	230.000.000,00	224.760.738,00	97,72	65.678.898,00	649.948.329,00	114,03
	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>	<b>6.285.430.694,00</b>	<b>1.835.640.064,00</b>	<b>3.692.064.151,00</b>	<b>3.565.162.892,00</b>	<b>96,56</b>	<b>881.277.525,00</b>	<b>6.282.080.481,00</b>	<b>99,95</b>
	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	<b>6.285.430.694,00</b>	<b>1.835.640.064,00</b>	<b>3.692.064.151,00</b>	<b>3.565.162.892,00</b>	<b>96,56</b>	<b>881.277.525,00</b>	<b>6.282.080.481,00</b>	<b>99,95</b>
	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	1.120.000.000,00	160.119.977,00	229.865.750,00	227.797.500,00	99,10	281.774.800,00	669.692.277,00	59,79
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	5.165.430.694,00	1.675.520.087,00	3.462.198.401,00	3.337.365.392,00	0,00	599.502.725,00	5.612.388.204,00	108,65
	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>3.988.831.018,00</b>	<b>1.085.460.522,00</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>633.229.335,00</b>	<b>95,94</b>	<b>640.812.672,00</b>	<b>2.359.502.529,00</b>	<b>59,15</b>
	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu</b>	<b>3.988.831.018,00</b>	<b>1.085.460.522,00</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>633.229.335,00</b>	<b>95,94</b>	<b>640.812.672,00</b>	<b>2.359.502.529,00</b>	<b>59,15</b>

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.773.031.018,00	559.542.222,00	-	-	#DIV/0!	-	950.111.329,00	53,59
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik			180.000.000,00	178.850.635,00		211.718.472,00		
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1.230.000.000,00	384.946.000,00	-	-	#DIV/0!	-	823.966.400,00	66,99
Pemantauan , Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten / Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha			250.000.000,00	229.600.000,00	91,84	209.420.400,00		
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	795.800.000,00	140.972.300,00	-	-	#DIV/0!	-	415.872.000,00	52,26
Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha Yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik			170.000.000,00	164.783.700,00	96,93	110.116.000,00		
Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten / Kota	190.000.000,00	155.475.649,00	60.000.000,00	59.995.000,00	99,99	109.557.800,00	325.028.449,00	171,07

	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>	<b>2.175.726.010,00</b>	<b>1.491.445.076,00</b>	<b>686.106.000,00</b>	<b>564.415.299,00</b>	<b>82,26</b>	<b>379.447.112,00</b>	<b>2.435.307.487,00</b>	<b>111,93</b>
		<b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>							-	
	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>2.175.726.010,00</b>	<b>1.338.734.578,00</b>	<b>686.106.000,00</b>	<b>564.415.299,00</b>	<b>82,26</b>	<b>379.447.112,00</b>	<b>2.282.596.989,00</b>	<b>104,91</b>
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	520.726.010,00	152.710.498,00	-	-	#DIV/0!	-	336.030.901,00	64,53
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya			-	132.416.000,00	100.911.291,00		82.409.112,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	825.000.000,00	843.832.320,00	-	-	#DIV/0!	-	1.312.944.920,00	159,14
	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha				328.859.000,00	321.184.600,00		147.928.000,00		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	830.000.000,00	342.191.760,00	-	-	#DIV/0!	-	633.621.168,00	76,34
	Pengawasan Penanaman Modal				224.831.000,00	142.319.408,00		149.110.000,00		

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	725.242.003,00	249.593.348,00	140.000.000,00	138.306.861,00	98,79	127.021.904,00	514.922.113,00	71,00
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota	725.242.003,00	249.593.348,00	140.000.000,00	138.306.861,00	98,79	127.021.904,00	514.922.113,00	71,00
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	725.242.003,00	249.593.348,00	140.000.000,00	138.306.861,00	98,79	127.021.904,00	514.922.113,00	71,00

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003

### 2.1.2. Evaluasi terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024 tersaji pada tabel berikut.

**Tabel 2. 2 Realisasi Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2024**

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5
<b>2.18.2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>7.575.199.999,00</b>	<b>7.197.128.841,00</b>	<b>95,01</b>
<b>2.18.2.18.01.2.01</b>	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>106.000.000,00</b>	<b>99.337.256,00</b>	<b>93,71</b>
2.18.2.18.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000,00	6.610.800,00	82,64
2.18.2.18.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.000.000,00	2.802.900,00	93,43
2.18.2.18.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.000.000,00	2.243.000,00	74,77
2.18.2.18.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.000.000,00	1.916.200,00	95,81
2.18.2.18.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25.000.000,00	23.736.156,00	94,94
2.18.2.18.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	65.000.000,00	62.028.200,00	95,43
<b>2.18.2.18.01.2.02</b>	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>4.616.000.000,00</b>	<b>4.460.036.348,00</b>	<b>96,62</b>
2.18.2.18.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.600.000.000,00	4.444.626.248,00	96,62
2.18.2.18.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.000.000,00	7.666.900,00	95,84
2.18.2.18.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8.000.000,00	7.743.200,00	96,79
<b>2.18.2.18.01.2.05</b>	<b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>86.060.000,00</b>	<b>49.878.700,00</b>	<b>57,96</b>
2.18.2.18.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	45.060.000,00	90,12
2.18.2.18.01.2.05.03	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.000.000,00	4.818.700,00	96,37
2.18.2.18.01.2.05.10	Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0
2.18.2.18.01.2.05.11	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	31.060.000,00	0,00	0

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5
<b>2.18.2.18.01.2.06</b>	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>750.705.721,00</b>	<b>746.345.659,00</b>	<b>99,42</b>
2.18.2.18.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000,00	14.517.000,00	96,78
2.18.2.18.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	219.751.721,00	217.975.700,00	99,19
2.18.2.18.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	165.954.000,00	163.854.000,00	98,73
2.18.2.18.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350.000.000,00	349.995.959,00	100
<b>2.18.2.18.01.2.07</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>498.416.278,00</b>	<b>460.100.000,00</b>	<b>92,31</b>
2.18.2.18.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	200.000.000,00	196.600.000,00	98,30
2.18.2.18.01.2.07.10	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.635.078,00	179.600.000,00	97,27
2.18.2.18.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.781.200,00	83.900.000,00	73,74
<b>2.18.2.18.01.2.08</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>601.918.000,00</b>	<b>587.437.278,00</b>	<b>97,59</b>
2.18.2.18.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
2.18.2.18.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	258.158.000,00	243.677.278,00	94,39
2.18.2.18.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	340.760.000,00	340.760.000,00	100
<b>2.18.2.18.01.2.09</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>916.100.000,00</b>	<b>793.993.600,00</b>	<b>86,67</b>
2.18.2.18.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	150.000.000,00	142.782.400,00	95,19
2.18.2.18.01.2.09.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.000.000,00	2.718.200,00	67,96
2.18.2.18.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	728.100.000,00	626.718.000,00	86,08
2.18.2.18.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15.000.000,00	14.695.000,00	97,97
2.18.2.18.01.2.09.11	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.000.000,00	7.080.000,00	37,26
<b>2.18.2.18.02</b>	<b>Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal</b>	<b>497.166.000,00</b>	<b>488.055.544,00</b>	<b>98,17</b>
<b>2.18.2.18.02.</b>	<b>Kegiatan Penetapan Pemberian</b>	<b>139.000.000,00</b>	<b>135.651.288,00</b>	<b>97,59</b>

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5
<b>2.01</b>	<b>Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
2.18.2.18.02. 2.01.01	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	39.000.000,00	36.706.088,00	94,12
2.18.2.18.02. 2.01.03	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten / Kota	100.000.000,00	98.945.200,00	98,95
2.18.2.18.02. 2.02	<b>Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</b>	<b>358.166.000,00</b>	<b>352.404.256,00</b>	<b>98,39</b>
2.18.2.18.02. 2.02.01	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	128.166.000,00	127.643.498,00	99,59
2.18.2.18.02. 2.02.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	230.000.000,00	224.760.758,00	97,72
<b>2.18.2.18.03</b>	<b>Program Promosi Penanaman Modal</b>	<b>3.692.064.151,00</b>	<b>3.565.162.892,00</b>	<b>96,56</b>
<b>2.18.2.18.03. 2.01</b>	<b>Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.692.064.151,00</b>	<b>3.565.162.892,00</b>	<b>96,56</b>
2.18.2.18.03.2 .01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	229.865.750,00	227.797.500,00	99,10
2.18.2.18.03. 2.01.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	3.462.198.401,00	3.337.365.392,00	96,39
<b>2.18.2.18.04</b>	<b>Program Pelayanan Penanaman Modal</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>633.229.335,00</b>	<b>95,94</b>
<b>2.18.2.18.04. 2.01</b>	<b>Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>660.000.000,00</b>	<b>633.229.335,00</b>	<b>95,94</b>
2.18.2.18.04. 2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	60.000.000,00	59.995.000,00	99,99
2.18.2.18.04. 2.01.06	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	180.000.000,00	178.850.635,00	99,36
2.18.2.18.04. 2.01.07	Sub.Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.	141.000.000,00	140.972.300,00	99,98
2.18.2.18.04. 2.01.08	Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	250.000.000,00	229.600.000,00	91,84
<b>2.18.2.18.05</b>	<b>Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	<b>686.106.000,00</b>	<b>564.415.299,00</b>	<b>82,26</b>
<b>2.18.2.18.05. 2.01</b>	<b>Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>686.106.000,00</b>	<b>564.415.299,00</b>	<b>82,26</b>
2.18.2.18.05. 2.01.04	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	132.416.000,00	100.911.291,00	76,21

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5
2.18.2.18.05. 2.01.05	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	328.859.000,00	321.184.600,00	97,67
2.18.2.18.05. 2.01.06	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	224.831.000,00	142.319.408,00	63,30
<b>2.18.2.18.06</b>	<b>Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>138.306.861,00</b>	<b>98,79</b>
<b>2.18.2.18.06. 2.01</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>138.306.861,00</b>	<b>98,79</b>
2.18.2.18.06. 2.01.01	Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	140.000.000,00	138.306.861,00	98,79
	<b>Jumlah</b>	<b>13.250.536.150,00</b>	<b>12.586.298.772,00</b>	<b>94,99</b>

Sumber: Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun 2024

Berdasarkan data pada Tabel 2.2 tersebut di atas dapat diketahui bahwa pada tahun anggaran 2024, aspek dukungan dana yang digunakan dalam membiayai 1 (Satu) urusan, 6 (Enam) program dan 13 (Tiga Belas) kegiatan serta 42 (Empat Puluh Dua) Sub Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang adalah sebesar Rp 13.250.536.150,00. Dari anggaran tersebut, realisasinya adalah sebesar Rp 12.1586.298.772,00 (94,99 %) dengan sisa sebesar Rp 664.237.378,00 (5,01 %).

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang

Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah melaksanakan fungsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar di Kabupaten Ketapang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sistem Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025-2029. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Sampai Dengan Tahun 2024**

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	`Target Renstra				Realisasi Kinerja		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Persentase Peningkatan Realisasi PMA / PMDN			2,05	2,75	3,45	4.15	8,51	-	4,5	-	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan			95	96	97	98	99.30	-	99,5	-	

Sumber: Data LKPM

Dari data Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sampai dengan tahun 2024 dapat dianalisis sebagai berikut.

- a. Persentase Peningkatan Nilai Realisasi Investasi PMDN / PMA Tahun 2024 mengalami peningkatan 8,51% hal ini dikarenakan Realisasi Investasi Pada Tahun 2024 lebih tinggi atau naik yaitu Rp. 8,601 Triliun dibandingkan Realisasi Investasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 7,927 Triliun.

Naiknya nilai investasi pada tahun 2024 disebabkan laporan dari LKPM bahwa salah satunya adanya kegiatan proyek strategis nasional.

- b. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2024 sebesar 99,30 dari yang ditargetkan yaitu sebesar 96 yang berarti ada peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

### **2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tidak lepas dari isu- isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, maupun isu-isu yang bersifat eksternal.

Adapun permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menjalankan fungsi penanaman modal adalah sebagai berikut.

- a. Belum sinkronnya regulasi yang dibuat oleh pusat dengan regulasi yang ada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kabupaten, terkait dengan masih kurang sempurnanya system dan tumpeng tindh kewenangan.
- b. Kurangnya Sosialisasi dalam menyebarluaskan informasi terkait proses perizinan OSS RBA terhadap masyarakat luas di kabupaten Ketapang.
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.
- d. Kurangnya pelatihan atau bimtek yang diikuti oleh tenaga pelayanan
- e. Fasilitas internet yang belum maksimal yang ada di kecamatan

Permasalahan tersebut di atas dapat berdampak pada pencapaian visi dan misi kepala daerah, meskipun secara tidak langsung. Karena itu ke depan perlu diupayakan

pemecahannya dalam rangka mengoptimalkan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya perlu diperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ., yaitu sebagai berikut:

a. Tantangan

- 1) Bagaimana Mensinergikan regulasi yang dibuat oleh pusat dengan regulasi yang ada di daerah / kabupaten.
- 2) Bagaimana menyebarluaskan informasi kepada para pelaku usaha terkait proses perizinan OSS RBA
- 3) Memaksimalkan sumber daya yang ada dengan kondisi sarana dan prasarana yang terbatas.
- 4) Kemajuan era digital dan teknologi harus diikuti dengan kemampuan dan skil SDM
- 5) Kondisi geografis yang luas dan jaringan internet yang belum memadai tetap mendapatkan pelayanan perizinan.
- 6) Mengubah pola pikir masyarakat yang sering beranggapan bahwa mengurus atau membuat izin usaha sangat rumit dan mahal.

b. Peluang

- 1) Kemudahan dalam mengakses perizinan yang dilakukan secara Online dengan Sistem OSS RBA.
- 2) Potensi usaha yang cukup banyak untuk dikembangkan di kabupaten
- 3) Adanya anggaran yang disiapkan untuk pengembangan kapasitas SDM
- 4) Pelaku usaha besar dapat menjadi mitra usaha bagi pelaku usaha kecil / UMKM.

Dengan menelaah hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan berikut permasalahan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, dapat diformulasikan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut:

- a. Melakukan koordinasi secara kontinyu dengan BKPM ( pusat ) terkait dengan regulasi yang diterbitkan dan kesesuaian dengan regulasi yang ada di daerah.
- b. Meningkatkan promosi investasi baik dengan mengikuti even secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik ( web site, IG, FB dll ).
- c. Melakukan sosialisasi tentang pelayanan perizinan berusaha secara berkelanjutan.

#### **2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**

Penyusunan RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, dimana tahun 2026 merupakan tahun ke-lima dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026, serta RKP Tahun 2026. Rumusan tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 adalah ***“Penguatan Infrastruktur dan Ketahanan Pangan Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah.”*** dengan 7 (tujuh ) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- a. Prioritas Daerah 1 : Pembangunan Infrastruktur Secara Merata
- b. Prioritas Daerah 2 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing
- c. Prioritas Daerah 3 : Peningkatan Perekonomian Masyarakat Secara Berkeadilan
- d. Prioritas Daerah 4 : Memperkuat Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Daerah
- e. Prioritas Daerah 5 : Pembangunan Kehidupan Sosial dan Budaya
- f. Prioritas Daerah 6 : Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan Serta Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
- g. Prioritas Daerah 7 : Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Ketapang tahun 2026 tersebut secara rinci dijabarkan ke dalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya sebagai berikut:

- a. Indeks Pembangunan Manusia ( IPM )
- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi ( LPE )
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka ( TPT )
- d. Tingkat Kemiskinan
- e. Indeks Gini

Rumusan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2026 tersebut diharapkan dapat mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Ketapang tahun 2026, terutama pencapaian indikator makro sebagai berikut:

- a. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,70 persen
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,3
- c. Angka kemiskinan sebesar 9,00 persen
- d. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,20 persen
- e. Indeks Gini sebesar ....

Secara khusus, sesuai tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang mendukung pencapaian prioritas 3 (tiga), yaitu **“Peningkatan Perekonomian Masyarakat Secara Berkeadilan ”**. dan Priritas 7 (tujuh) yaitu : **“ Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik “**. Untuk selanjutnya, dalam melakukan review dilakukan proses membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan dalam penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026, yaitu sebagaimana tersaji pada tabel 2.4 berikut.

**TABEL 2.4**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikatif ( Rp. 000 )	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja (%)	Pagu Indikatif ( Rp. 000 )
1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>	Ketapang	100	6.103.500,00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>Persentase Kebutuhan Penatausahaan Administrasi Pemerintahan yang Terpenuhi</b>	Ketapang	100	8.707.300,00
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	Ketapang	100	77.000,00	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Tepat Waktu</b>	Ketapang	100	98.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	100	8.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Ketapang	100	10.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	100	3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Ketapang	100	4.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang	-	-	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Ketapang	100	2.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	100	3.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Ketapang	100	4.000,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	100	2.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Ketapang	100	3.000,00
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	100	25.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ketapang	100	35.000,00
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	100	36.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketapang	100	40.000,00
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>	Ketapang	100	4.618.000,00	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu</b>	Ketapang	100	4.820.000,00
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	100	4.600.000,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Ketapang	100	4.800.000,00

9	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	0	-	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ketapang	0	-
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	100	9.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Ketapang	100	9.000,00
11	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	0	-	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Ketapang	100	2.000,00
12	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Ketapang	100	9.000,00	Koordinasi dan dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Ketapang	100	9.000,00
13	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketapang	0	-	Penyusunan Pelaporan dan Analisis PrognosisRealisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Ketapang	0	-
III	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>180.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>195.000,00</b>
14	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ketapang	0	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Ketapang	0	-
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	0	25.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Ketapang	100	40.000,00
16	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	100	5.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Ketapang	100	5.000,00
17	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	100.000,00	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	100.000,00
18	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	50.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Ketapang	100	50.000,00
V	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>377.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>712.500,00</b>
26	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	7.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	17.500,00
27	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	150.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	270.000,00
28	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	100	20.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Ketapang	100	75.000,00
29	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang	0	-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Ketapang	0	-


30	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	100	200.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Ketapang	100	350.000,00
<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>210.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>1.300.000,00</b>
31	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	100	-	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Ketapang	100	800.000,00
32	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	0	10.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Ketapang	0	100.000,00
33	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	150.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	250.000,00
34	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	50.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Ketapang	100	150.000,00
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>455.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>625.800,00</b>
35	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	100	5.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ketapang	100	5.000,00
36	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	100	130.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Ketapang	100	300.000,00
37	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	320.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Ketapang	100	320.800,00
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>186.500,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Ketapang	100	<b>956.000,00</b>
38	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	100	55.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Ketapang	100	120.000,00
39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	100	6.500,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Ketapang	100	6.000,00
40	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	100.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	700.000,00
41	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	15.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dipelihara/Direhabilitasi	Ketapang	100	30.000,00

42	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Ketapang	100	10.000,00	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Ketapang	100	100.000,00
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>	Ketapang	100	<b>393.270,96</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>	Ketapang	100	<b>500.000,00</b>
<b>IX</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>153.270,96</b>	<b>Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di Bidang Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>200.000,00</b>
43	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ketapang	100	75.000,00	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ketapang	100	100.000,00
44	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	78.270,96	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Jumlah Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	100.000,00
<b>X</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	Ketapang	100	<b>240.000,00</b>	<b>Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi</b>	Ketapang	100	<b>300.000,00</b>
45	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	110.000,00	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Ketapang	100	150.000,00
46	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketapang	100	130.000,00	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Ketapang	100	150.000,00
<b>C</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>1.420.145,13</b>	<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</b>	Ketapang	100	<b>1.700.000,00</b>
<b>XI</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>1.420.145,13</b>	<b>Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>1.700.000,00</b>
47	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Ketapang	100	250.000,00	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Ketapang	100	200.000,00
48	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Ketapang	100	1.170.145,13	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Ketapang	100	1.500.000,00

D	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	901.245,95	<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Kepuasan antara masyarakat dengan pelayanan Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	920.000,00
XII	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu</b>	Ketapang	100	901.245,95	<b>Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu satu Pintu</b>	Ketapang	100	920.000,00
49	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Ketapang	100	381.245,95	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik	Ketapang	100	350.000,00
50	Pemantauan, Analisis , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	300.000,00	Pemantauan, Analisis , Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	280.000,00
51	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	170.000,00	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ketapang	100	160.000,00
52	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ketapang	100	50.000,00	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Ketapang	100	130.000,00
E	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>	Ketapang	100	491.588,70	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>1.Persentase Metode dan Sistem Perhitungan PMA dan PMDN yang Kompetibel</b>	Ketapang	100	650.000,00
		<b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>	Ketapang	0	-		<b>2. Persentase Peningkatan Perusahaan yang melaporkan LKPM secara Berkala</b>	Ketapang	0	-
XIII	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	491.588,70	<b>Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	650.000,00
53	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Ketapang	100	111.588,70	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang dapat diselesaikannya Permasalahan dan Hambatan dalam merealisasikan kegiatan usahanya	Ketapang	100	150.000,00
54	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Ketapang	100	190.000,00	Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Ketapang	100	300.000,00

55	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	Ketapang	100	190.000,00	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pengawasan Penanaman Modal	Ketapang	100	200.000,00
F	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>163.862,90</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Persentase Keterpaduan antara Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal</b>	Ketapang	100	<b>150.000,00</b>
XIV	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Ketapang	100	<b>163.862,90</b>	<b>Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	<b>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten / Kota</b>	Ketapang	100	<b>150.000,00</b>
56	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ketapang	100	163.862,90	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Ketapang	100	150.000,00
					<b>9.473.613,63</b>					<b>12.627.300,00</b>

Ketapang, Januari 2025  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670427 200003 1 003

Rancangan awal RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026 sesuai/tidak sesuai dengan Hasil Analisis Kebutuhan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026. Dari tabel diatas terdapat penambahan anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan yang diproyeksi ada kenaikan dan ada penambahan anggaran pemeliharaan Gedung Kantor yang diperuntukkan untuk Gedung MPP sehingga dilakukan penyesuaian kembali anggaran belanja pada beberapa program/kegiatan dan sub kegiatan.

## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2026 telah dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang pada tahun 2025, yaitu melalui Rembug Warga, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Tingkat Kabupaten. Dari hasil pelaksanaan Musrenbang tersebut kemudian dapat dijangkau berbagai aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan. Umumnya aspirasi diarahkan pada Perangkat Daerah Teknis. Namun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang juga memiliki tanggung jawab dalam mengkoordinasikan pengakomodiran usulan-usulan tersebut dalam perencanaan pada Perangkat Daerah terkait. Khusus untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, telah terjaring beberapa aspirasi masyarakat ataupun para pemangku kepentingan, baik aspirasi berupa usulan kegiatan, pertanyaan, maupun hasil pelaksanaan reses oleh DPRD Kabupaten Ketapang. Adapun usulan kegiatan yang ditujukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang beserta tanggapannya sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.5	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal				
2.1	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Di Bidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
2.2	Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
3.	Program Promosi Penanaman Modal				
3.1	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
4.	Program Pelayanan Penanaman Modal				
4.1	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
5.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal				
5.1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
6.	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal				

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6
6.1	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

### **3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelahaan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Berdasarkan RPJMN BKPM 2020 -2024 ada 3 ( tiga ) arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang ingin dicapai yaitu :

- a. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal
- b. Meningkatnya Kepercayaan Pelaku Usaha / Penanam Modal dan
- c. Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Efektif dan Melayani

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 merupakan pelaksanaan dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2021-2026 Adapun tujuan yang ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tersebut, yang kemudian menjadi tujuan dari Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026, yaitu **TERWUJUDNYA IKLIM INVESTASI YANG KOMPETITIF**.

Dalam mencapai tujuan tersebut ditetapkan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang yaitu “**Meningkatnya Realisasi Investasi dan Meningkatnya Pelayanan Publik**”, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- a. Persentase Peningkatan Investasi

b. Nilai Realisasi Investasi

c. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan

Demikian pula dalam penetapan target dari indikator tujuan dan sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 mengacu pada target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025- 2029, yaitu sebagaimana tabel 3.1 berikut.

**Tabel 3. 1 Target Indikator Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2026
1	2	3	4	5
Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif		Persentase Peningkatan Investasi	Persen	1,05
	Meningkatnya Realisasi Investasi	Nilai Realisasi Investasi	Triliun Rupiah	8.778
	Meningkatnya Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	Nilai	99,75

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025 – 2029.

### 3.3. Program dan Kegiatan

Sebagai dasar penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenlatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan dan Kepmendagri No. 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Kepmendagri No. 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Adapun untuk penyusunan Program, Kegiatan, Sub kegiatan pada tahun 2026 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang sebagai berikut :

- 1) Jumlah program yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 adalah sebanyak 6 (Enam) program, yang terdiri dari : 1 ( satu ) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dan 5 ( lima ) program terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- 2) Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 adalah sebanyak 13 (Tiga Belas) kegiatan, yang terdiri dari 7 ( Tujuh ) kegiatan penunjang, dan 6 ( Enam ) kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
- 3) Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 adalah sebanyak 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan, yang terdiri dari 42 (Empat Puluh Dua) sub kegiatan penunjang, dan 14 (Empat Belas) sub kegiatan terkait pelaksanaan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .;

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 disertai indikator kinerja tersaji pada tabel berikut.

**3.2 Program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026**

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		
2	18	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
2	18	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2	18	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
2	18	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Dokumen
2	18	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
2	18	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
2	18	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
						Daerah (Dokumen)	
2	18	01	2.01	009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Data
2	18	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
2	18	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
2	18	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
2	18	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
2	18	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
2	18	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
2	18	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
2	18	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
2	18	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang
2	18	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
2	18	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
2	18	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
2	18	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
						Disediakan	
2	18	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen
2	18	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
2	18	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
2	18	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
2	18	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	18	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
2	18	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
2	18	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
2	18	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	18	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
2	18	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
2	18	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
						Dipelihara/Direhabilitasi	
2	18	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL		
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemebrian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	2.02	003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi (Daerah)	Daerah
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	JumlahDokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL		
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL		

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>		
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usha dalam merealisasikan Kegiatan Ushanya	Kegiatan Usaha
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN			
						Risiko	
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KETAPANG**

Berdasarkan analisa kebutuhan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang tahun 2026 menetapkan 6 (Enam) program, Tiga Belas (Tiga Belas) kegiatan dan 46 (Empat Puluh Enam) sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sesuai dengan tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka secara garis besar proyeksi total kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp 8.809.618.252,68 yang terdiri dari:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 7.222.036.696
- b. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Rp 200.000.000,00
- c. Program Promosi Penanaman Modal Rp 377.581.556,68
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal Rp 610.000.000,00
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Rp. 350.000.000,00
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal  
Rp 50.000.000,00

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada tahun 2026 yang menampilkan rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan rencana anggaran beserta prakiraan maju tahun 2027 dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

**Tabel 4. 1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		
				TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	
		<b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>				<b>8,809,618,252.68</b>				<b>11,235,000,000.00</b>
	<b>2</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>			<b>8,807,618,252.68</b>					<b>11,233,000,000.00</b>
	<b>2.18</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>			<b>8,807,618,252.68</b>					<b>11,233,000,000.00</b>
1.	<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	-	-	<b>7,220,036,696.00</b>			-		<b>6,998,000,000.00</b>
		[ Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah ]	Nilai IKM Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.3 96.5	7,220,036,696.00	-	-	-		6,998,000,000.00
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	96,000,000.00			-		160,000,000.00
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	8,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			9,000,000.00
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,000,000.00
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	4,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			4,000,000.00
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	3,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3,000,000.00
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	35,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			55,000,000.00
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	40,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			80,000,000.00
	2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	0.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			1,000,000.00
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	0.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			2,000,000.00

2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	4,998,036,696.00			-	4,819,000,000.00
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	4,982,036,696.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		4,800,000,000.00
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	8,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9,500,000.00
2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD							
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	8,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		9,500,000.00
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	115,000,000.00			-	331,000,000.00
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya							
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	40,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		60,000,000.00
2.18.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian							
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	5,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		6,000,000.00
2.18.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	20 Orang	20,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		210,000,000.00
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan							
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		55,000,000.00
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	590,000,000.00			-	649,500,000.00
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	10,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7,500,000.00
2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	250,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		210,000,000.00
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket	30,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22,000,000.00
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	300,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		410,000,000.00
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	300,000,000.00			-	282,000,000.00
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel							
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		12,000,000.00
2.18.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	150,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160,000,000.00
2.18.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00

	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	625,000,000.00			-	475,500,000.00
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan	5,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		5,500,000.00
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	300,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140,000,000.00
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	320,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		330,000,000.00
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	496,000,000.00			-	281,000,000.00
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14 Unit	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		80,000,000.00
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	6,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		7,000,000.00
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	300,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		130,000,000.00
	2.18.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	30,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		42,000,000.00
	2.18.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	60,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		22,000,000.00
2.	2.18.02	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>1. Persentase peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan</b>	<b>100 %</b>	<b>200,000,000.00</b>			-	<b>630,000,000.00</b>
		[ Meningkatkan kemudahan berinvestasi ]	Realisasi Total terhadap Target Investasi	100	200,000,000.00	-	-	-	630,000,000.00
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan tentang kemudahan berinvestasi yang disahkan	100 %	100,000,000.00			-	270,000,000.00
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal							
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	10 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		160,000,000.00
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase Pembuatan Peta Potensi Investasi	100 %	100,000,000.00			-	360,000,000.00
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120,000,000.00
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)							
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	5 Daerah	0.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		100,000,000.00
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota							
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	10 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		140,000,000.00

3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	1. <i>Persentase peningkatan kerjasama promosi investasi antar perangkat daerah</i>	100 %	377,581,556.68			-	1,910,000,000.00
		[ <i>Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal</i> ]	<i>Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi</i>	35	377,581,556.68	-	-	-	1,910,000,000.00
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Peningkatan Kerjasama Promosi Investasi antar Perangkat Daerah</i>	100 %	377,581,556.68			-	1,910,000,000.00
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	327,581,556.68	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		1,600,000,000.00
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota							
			<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		310,000,000.00
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	1. <i>Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal undefined</i>	100 % undefined	610,000,000.00			-	1,000,000,000.00
		[ <i>Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko</i> ]	<i>Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan</i>	98.5	610,000,000.00	-	-	-	1,000,000,000.00
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Persentase Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal melalui MPP dan Cakupan Pelayanan undefined</i>	100 % undefined	610,000,000.00			-	1,000,000,000.00
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah							
			<i>Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	1 Dokumen	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		110,000,000.00
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik							
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	1000 Pelaku Usaha	180,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		400,000,000.00
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko							
			<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>	1 Pelaku Usaha	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		180,000,000.00
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko							
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i>	1 Kegiatan Usaha	230,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		310,000,000.00
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	-	350,000,000.00			-	520,000,000.00
		[ <i>Terkendalinya Pelaksanaan Penanaman Modal</i> ]	<i>Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha</i>	100	350,000,000.00	-	-	-	520,000,000.00
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-	350,000,000.00			-	520,000,000.00
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya							
			<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>	8 Kegiatan Usaha.	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		120,000,000.00
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha							
			<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>	70 Pelaku Usaha	150,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200,000,000.00
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal							
			<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan</i>	8 Kegiatan Usaha	100,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		200,000,000.00

6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	1. <i>Persentase data informasi perizinan dan non perizinan yang dikelola menggunakan sistem</i>	100 %	50,000,000.00			-	175,000,000.00
		[ Meningkatkan Pemanfaatan dan Informasi Penanaman Modal ]	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	100	50,000,000.00	-	-	-	175,000,000.00
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten /Kota</i>	100 %	50,000,000.00			-	175,000,000.00
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
			<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>	1 Dokumen	50,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		175,000,000.00
	X	NON URUSAN			2,000,000.00				2,000,000.00
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			2,000,000.00				2,000,000.00
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	2,000,000.00			-	2,000,000.00
		-	-	-	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-	2,000,000.00			-	2,000,000.00
	X.XX.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan							
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan</i>	1 Dokumen	2,000,000.00	Kab. Ketapang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)		2,000,000.00
<b>J U M L A H</b>					<b>8,809,618,252.68</b>				<b>11,235,000,000.00</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

#### **a. Catatan Penting**

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 antara lain:

- 1) Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ketapang.
- 2) Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2025-2029, di mana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2026 telah termuat dalam Renja. Selain itu terdapat penambahan output / keluaran kegiatan sebagai respon terhadap kebutuhan atau isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 3) Penyusunan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2026, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

#### **b. Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Kaidah pelaksanaan Dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 ini memuat antara lain :

- 1) Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran

(DPA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026;

- 2) Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Ketapang;
- 3) Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026.

### **c. Rencana Tindak Lanjut**

Sebagai tindak lanjut dari penyusunan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Akan dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan dokumen Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 untuk setiap triwulannya.
- 2) Program dan kegiatan pada Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 ini akan dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.
- 3) Keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab seluruh pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang, dengan melibatkan partisipasi serta peran aktif masyarakat dan stakeholder pembangunan di Kabupaten Ketapang.

Dengan disusunnya Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang Tahun 2026 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Renja ini juga diharapkan dapat menjadi acuan / pedoman dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sekaligus sebagai ukuran dari keberhasilan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ketapang pada Tahun Anggaran 2026.

Ketapang, 4 Agustus 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Kabupaten Ketapang



**Drs. MARWANNOR, MM**

**Pembina Utama Muda**

NIP. 19670427 200003 1 003